

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 -2016



Disusun Oleh:

*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN PACITAN*

Jalan Walanda Maramis Nomor 09 Pacitan

Telp/Fax (0357) 886164

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	L 1
1.2 Landasan Hukum.....	L 5
1.3 Maksud dan Tujuan	M 3
1.4 Sistematika Penulisan.....	Si 4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	T 8
2.2 Sumber Daya SKPD.....	S 13
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	Ki 17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	T 21
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	23
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota.....	28
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	Visi dan Misi SKPD	36

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	37
4.3 Strategi dan Kebijakan	39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	45
---	-----------

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	52
---	-----------

BAB VII PENUTUP	56
------------------------------	-----------

BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument penanggungjawaban, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena Rencana Strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan secara

sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Lebih lanjut disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 Tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 Tahun. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD dengan jangka waktu 5 Tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Alam;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan adalah untuk memberikan arah kegiatan pembangunan dan hasil yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun mendatang.

Tujuannya adalah sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan ditetapkan Perda No 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.6 Sumber Daya SKPD
- 2.7 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan SKPD

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.6 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

- 3.7 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.10 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.4 Visi dan Misi SKPD
- 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.6 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II

Gambaran Pelayanan SKPD

Dengan posisi Kabupaten Pacitan terletak di Propinsi Jawa Timur diantara $110^{\circ}56'$ – $111^{\circ}25'$ Bujur Timur dan $07^{\circ}55'$ – $08^{\circ}17'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.389,87 Km² atau 138.987,16 Ha. Dari luasan wilayah tersebut sebagian besar berupa bukit, gunung dan jurang terjal dan termasuk jajaran pegunungan seribu (*Ring of Fire*). Secara administratif Kabupaten Pacitan terbagi dalam 12 wilayah kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa.

Dikarenakan kondisi demografis alam yang seperti itu, maka potensi bencana yang rawan terjadi adalah sebagai berikut :

a. Gempa bumi,

Daerah Kabupaten Pacitan yang berada di atas lempeng India-Australia kondisinya saat ini sangat rapat karena mendapat tekanan dari lempeng Eropa-Asia. Kondisi lempeng Jawa Selatan yang rapat dan tertekan itu sewaktu-waktu bisa patah sehingga menimbulkan gempa. Berdasarkan realita tersebut maka seluruh wilayah Kabupaten Pacitan masuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi.

b. Tanah longsor/gerakan tanah,

Adapun kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah di Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 40% dan kawasan yang memiliki jenis tanah Redzina dan litosol. Pada kawasan yang memiliki kriteria tersebut penggunaan lahan sedapat mungkin berupa hutan lindung/hutan rakyat. Daerah yang termasuk kedalam kawasan tanah longsor adalah Kecamatan Arjosari (Desa Mangunharjo dan Desa Temon), Kecamatan Tegalombo (Desa Kebondalem, Desa Ngreco, Desa Tegalombo,

Desa Puncangombo bagian Utara, dan Desa Gedangan), Desa Sendang Kecamatan Donorojo, dan Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan.

c. Gelombang pasang dan tsunami,

Tsunami merupakan gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan hingga ribuan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan.

Kabupaten Pacitan terletak di jalur gempa tektonik yang pada akhirnya akan menimbulkan tsunami memanjang di sepanjang pantai selatan Jawa. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pantai Selatan Kabupaten Pacitan merupakan kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Untuk itu penggunaan dan pengembangan lahan di sepanjang pantai Kabupaten Pacitan harus direncanakan sedemikian rupa agar dapat meminimalkan dampak yang akan terjadi jika ada tsunami.

Wilayah kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami adalah wilayah pantai di bagian selatan Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro Lokasi yang diarahkan penggunaan lahannya sebagai bahaya I tsunami adalah seluruh pantai yang terletak di Kabupaten Pacitan bagian selatan dengan kemiringan lahan yang landai sekitar 0-15%.

d. Banjir

Bahaya bencana banjir selain merupakan bahaya bencana yang disebabkan oleh proses alamiah siklus air, juga banyak dipengaruhi oleh perbuatan manusia dalam mengolah alam dan sumberdayanya yang menyebabkan keseimbangan ekosistem dan alam menjadi tidak stabil. Salah satu penyebab terjadinya banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan adalah adanya perilaku merusak (vandalism) yang dilakukan oleh manusia antara lain pengrusakan hutan, kawasan penyangga dan daerah aliran sungai mengakibatkan siklus air yang secara alami terjadi menjadi tidak seimbang antara run off dan serapan serta antara hulu dan hilir yang mengakibatkan bencana banjir dan juga tanah longsor.

Titik-titik rawan kejadian banjir di wilayah Kabupaten Pacitan sangat erat kaitannya dengan keberadaan sungai - sungai utama yang ada yaitu Sungai Baksoko, Sungai Lorog, Sungai Pagotan, Sungai Bawur dan terutama

Sungai Grindulu. Daerah yang masuk kedalam kawasan rawan banjir adalah sebagian wilayah Kecamatan Arjosari, Pacitan Kebonagung dan Ngadirojo. Saat ini penggunaan lahan di kawasan rawan banjir di Kabupaten Pacitan adalah sebagai kawasan permukiman. Pemerintah Kabupaten Pacitan belum mempunyai standar penanganan bencana yang diatur dalam Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Agar penanganan bencana dapat lebih efektif, maka perlu dibuat suatu standar penanganan bencana yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah ataupun Peraturan Daerah.

Guna mengatasi permasalahan yang menyangkut penanganan bencana tersebut baik mulai dari masa sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana, agar dapat tercapai dengan maksimal maka diperlukan suatu **Rencana Strategis** yang konseptual, realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan formal baik tingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya **Rencana Strategis** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing kegiatan.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan merupakan unsur pelaksana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku kepala Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan sebelum bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan

Nomor 05 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 05 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretaris
4. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan
5. Seksi Kedaruratan dan logistik
6. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Tim Pengarah

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

2.1.1 Kepala Badan

Kepala Badan Ex Officio mempunyai tugas memimpin badan dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien: dan Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

2.1.2 Kepala Pelaksana

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari yang meliputi pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi, dan mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian
- Pengkomandoan; dan
- Pelaksana

2.1.3 Sekretariat Pelaksana

Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas di bidang ketatausahaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan BPBD
- b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana, dan
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD

2.1.4 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;

- c. serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- e. serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

2.1.5 Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;

2.1.6 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

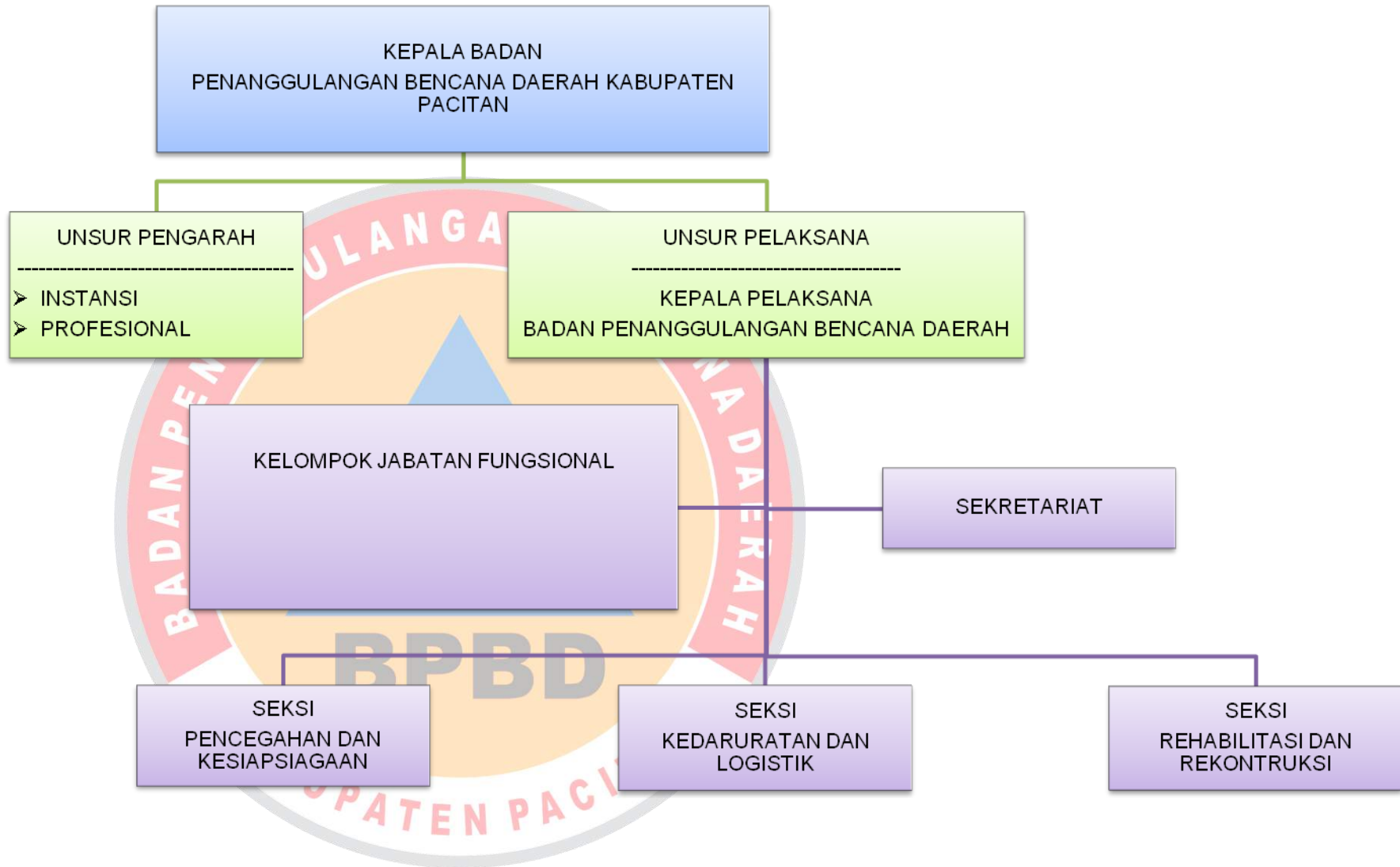
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana.



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana (Tabel 2.1)



2.2 SUMBER DAYA SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari jabatan 1 kepala badan ex Officio dijabat Sekretaris Daerah (pejabat eselon II.a), 1 Kepala Pelaksana Badan (eselon III.a), 1 Sekretaris (eselon IV.a), 3 kepala seksi (eselon IV.a), dan 7 orang staf. Personil keseluruhan sejumlah 12 orang, terdiri dari PNS 12 orang (100%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 9 orang (75%) dan perempuan 3 orang (25%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari: II/a 1 orang (8%), golongan II/b 3 orang (25%), golongan III/b 1 orang (8%), golongan III/c 4 orang (34%), golongan III/a 2 orang (17%), golongan III/b 1 orang (8%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel II.2**, dan daftar Jumlah pegawai berdasarkan eselon **Tabel II.3** sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel II.4**

Tabel II.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	TOTAL	KET
1.	IV	1	-	1	
2.	III	5	2	7	
3.	II	3	1	4	
	JUMLAH	9	3	12	

Tabel II.3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	PRIA	WANITA	TOTAL	KET
1.	II	-	-	-	
2.	III	1	-	1	
3.	IV	3	1	4	
JUMLAH		4	1	5	

Tabel II. 4 Data Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	TOTAL	KET
1.	S2	2	-	2	
2.	S1	2	2	4	
3.	DIII	1	-	1	
4.	DII	-	-	-	
5.	SLTA	4	1	5	
6.	SMP	-	-	-	
JUMLAH		9	3	12	

2.2.2 Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel II.5 berikut:

**Tabel II.5 Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Tahun peroleh	Keadaan Brg (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2011	B	1	Mutasi
2	Filling Besi/Metal		B	1	
3	Filling Besi/Metal		B	1	
4	Filling Besi/Metal			1	
5	Brand Kas		B	1	
6	White Board		B	2	
7	BALEHO		B	6	
8	Meja Kayu/Rotan		B	1	
9	Meja Kayu/Rotan		B	8	
10	Meja Kayu/Rotan		B	4	
11	Meja Kayu/Rotan			6	
12	Meja Kayu/Rotan			1	
13	Kursi Besi/Metal			10	
14	Meja Rapat		B	1	
15	Kursi Tamu		B	1	
16	Kursi Lipat		B	6	
17	Kursi Lipat		B	1	
18	Lemari Es		B	1	
19	AC Split		B	2	
20	AC Split			2	
21	Televisi			1	
22	Dispencer			1	
23	Kain penghias ruangan			1	
24	P.C. Unit (personal komputer)		B	1	
25	P.C. Unit (personal komputer)		B	2	
26	Note Book (personal komputer)		B	1	
27	Note Book (personal komputer) SONY VAIO	2013		1	Pengadaan
28	Note Book (personal komputer)		B	1	
29	Note Book (personal komputer)		B	1	
30	Printer (peralatan mini komputer)		B	1	
31	Printer (peralatan mini komputer)		B	2	
32	Printer (peralatan mini komputer)		B	1	
33	Printer (peralatan personal komputer)		B	1	
34	Camera + Attachmen (Peralatan studio Visual)		B	1	
35	Camera + Attachmen (Peralatan studio Visual)		B	2	
36	Proyektor + Atthachmen (Peralatan studio Visual)		B	1	
37	Audio Amplifier (Peralatan studio Visual)			2	
38	Audio Amplifier (Peralatan studio Visual)		B	1	
39	Handycame		B	1	
40	Power Supply (Peralatan studio Vidio film)		B	2	
41	Pesawat Telephone (alat komunikasi telephone)			1	
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	B	1	Mutasi

**Tabel II.6 Daftar Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Tahun peroleh	Keadaan Brg (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Ket
1	Mesin Water Treatment		B	1	
2	Stationary Generating Set		B	1	
3	Mesin Jense		B	1	
4	Mesin Jense	2013	B	2	Hibah
5	Mobil Tangki		B	1	
6	Sepeda Motor		B	1	
7	Sepeda Motor		B	1	
8	Sepeda Motor		B	1	
9	Jet Sky			2	
10	Perahu Karet		B	1	
11	Perahu Karet		B	1	
12	Betel, Senter, Drip, Drag, Sneper (peralatan tukang besi)		B	1	
13	Global Positioning System (alat ukur universal)		B	1	
14	Global Positioning System (alat ukur universal)			1	
15	Chain Saw (alat pengolah tanah dan tanaman)			2	
16	Tenda		B	1	
17	Tenda		B	2	
18	Tenda		B	3	
19	Tenda		B	5	
20	Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone)		B	3	
21	Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone)		B	6	
22	Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone)		B	2	
23	Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone)		B	6	
24	Radio SSB		B	1	
25	REFITER		B	1	
26	REFITER		B	1	
27	Unit Transceiver VHF Stationery (alat komunikasi radio VHF)		B	1	
28	Unit Transceiver VHF Stationery (alat komunikasi radio VHF)		B	2	
29	Unit Transceiver VHF Stationery (alat komunikasi radio VHF)		B	1	
30	Antena VHF/FM Stationery		B	2	
31	Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll)		B	14	
32	Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll)		B	10	
33	Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll)		B	14	
34	Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll)		B	14	
35	Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll)		B	14	
36	Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll)		B	1	

37	Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll)		B	1	
38	Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll)		B	2	
39	Alarm / Sirine		B	1	
40	Alarm / Sirine		B	1	
41	Velbed	2011	B	10	Hibah
42	Rambu Jalan	0		28	Pengadaan
43	Rambu Papan Tambahan	0	B	26	Pengadaan
44	Menara (Bangunan Monumen)	0	B	1	Hibah
45	Menara (Bangunan Monumen)	0	B	1	Pengadaan

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3.1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana

Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
- b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
- c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
- d. Pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2.3.2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

- a. Pencarian (search and rescue)
- b. Pertolongan melaksanakan pertolongan medis (P3K)
- c. Evakuasi
- d. Logistik / Dapur Umum

2.3.3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

- a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi
- b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan

- c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

2.3.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kabupaten Pacitan.

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada Tabel II.6



Tabel II.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan

Bidang Urusan Pemerintah dan ProgramPrioritas Pembangu nan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penan ggung Jawab	RUMUS	
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM				
			Realisasi	Rp	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
URUSAN WAJIB																			
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																			
Program pencegaha n dini dan penanggula ngan korban bencana alam			99.850.000	849.030.960	560.000.000	588.000.000	617.400.000	648.270.000	2.413.670.000	BPBD									
	% Penyediaa n sarana prasarana pencegaha n dini dan penanggul angan bencana	0	3%	38,97	44,12	47,84	62,47	76,49	76,49	BPBD	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana yang ada dibanding jumlah sarana dan prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana yang seharusnya tersedia x 100%								

	Kel./Desa siaga bencana (%)	-	-		2,92		4,09		5,85		8,77		9,94		9,94		BPBD	Desa yang mendapatkan sosialisasi bencana alam dibanding seluruh desa rawan bencana x 100%
	Tim penanggulangan bencana terdidik (%)	-	-		6,80		13,61		20,41		29,48		38,55		38,55		BPBD	Jumlah tim penanggulangan bencana yang dilatih dibanding jumlah seluruh tim penanggulangan bencana x 100%



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi:

- a. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
- b. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
- c. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di SKPD selain BPBD;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di duni ;
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
- i. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi:

- a. Adanya aturan tentang Penanggulangan Bencana yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42)
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- b. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan bidang penanggulangan bencana;
 - c. Kebutuhan masyarakat akan rasa aman dari bencana
 - d. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
 - f. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama (Nasional Provinsi, Kabupaten/Kota);
 - g. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.
 - h. Tidak adanya biaya dalam hal mendapatkan pengetahuan dan pelatihan kebencanaan
 - i. Dibukanya kesempatan secara luas untuk melaporkan kejadian bencana yang terjadi kepada seluruh masyarakat
 - j. Adanya kepedulian dari Pemerintah berupa bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah, berupa paket sembako dan uang santunan.

Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANANAN SKPD

Masyarakat Kabupaten Pacitan adalah masyarakat heterogen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti : Profesi , agama, adat istiadat dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda namun mereka tetap hidup berdampingan secara damai menjunjung tinggi toleransi dan menumbuhkembangkan sifat kegotongroyongan. Masyarakat di Kabupaten Pacitan pada umumnya bersifat tradisional dan miskin, hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana alam dan mudah diterpa isu-isu negatif

Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat , terencana dan terpadu dalam memaksimalkan semua potensi yang ada. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pacitan telah membentuk lembaga / satuan kerja yang khusus menangani bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan salah satu tugas pokoknya adalah : *menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mulai dari sebelum,pada saat dan setelah terjadinya bencana.*

Berkaitan dengan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagai unsur penunjang di bidang penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Keberadaan BPBD secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena bencana . Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat , sigap adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Tantangan yang hakiki dalam penanganan bencana untuk masa depan kita, adalah bagaimana potensi semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersenergi dalam penanggulangan bencana sehingga korban dan kerugian akibat bencana bisa dihindari atau diminimalisir.

Isu Aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus sesegera mungkin dilaksanakan.

3.1.1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
2. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
3. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
4. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di SKPD selain BPBD;

5. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan;
6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di duni ;
7. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
8. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
9. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

3.1.2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggapdaruratan dan logistik sebagai berikut:

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
4. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan
7. Belum memiliki SOP (Standar Operational Prosedur) Penanggulangan Bencana

3.1.3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

1. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
2. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
3. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
4. Koordinasi pinalainkerusakan dan kerugianserta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
5. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016.

Visi Kabupaten Pacitan:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA”

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

“PACITAN MAKMUR WONG CILIK GUMUYU”

- Misi 1 Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik
- Misi 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
- Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan.
- Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
- Misi 6 : Pengembangan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hal ini ditunjukkan melalui:

1. Pernyataan misi ke 1: Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik
 - ↳ Pada misi pertama ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penanganan bencana baik mulai tahap pra , pada saat dan pasca terjadinya bencana .
2. Pernyataan misi ke 3: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat Pada misi Ketiga ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat terutama pengetahuan dalam masalah penanganan bencana
3. Pernyataan misi ke 5: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Pada misi Kelima ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar terutama infrastruktur yang rusak terkena bencana .

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROPINSI DAN KABUPATEN

3.3.1. Faktor Penghambat

Beberapa hambatan dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan:

1. Kondisi Geografis Kabupaten Pacitan;
2. Penanganan Penanggulangan bencana rata-rata hanya secara sporadis karena belum semua BPBD mempunyai dasar hukum rencana penanggulangan bencana beserta turunannya (Protap, SOP, dll)
3. Keterbatasan anggaran;
4. Keterbatasan kualitas personil lembaga;
5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana;
6. Belum adanya keseragaman antara penyelenggaraan penanggulangan bencana mengenai tipe BPBD secara nasional.

3.3.2. Faktor Pendukung

Dari berbagai kebijakan permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam meningkatkan pelayanan :

1. Adanya Perda No 12 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana
2. Kepuasan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Terbentuknya masyarakat sadar bencana
4. Prosentase tim penanggulangan bencana terdidik
5. Penyaluran bantuan bencana secara cepat dan tepat sesuai sasaran
6. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana di kabupaten yang cukup memadai

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan terhadap Penanganan Bencana

a. Kebijakan Penanganan bencana secara nasional

Secara geografis Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berada di jalur yang dekat dengan lempeng aktif dunia serta letak demografis yang sebagian besar daerah perbukitan, sehingga sangat berpotensi terjadinya bencana. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana sesuai Undang-undang nomor 24 Tahun 2007.

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap. Hal ini dalam rangka pula pemenuhan peraturan turunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, serta pengaturan peran serta lembaga internasional maupun asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Sehingga harapan dari keseluruhan kegiatan dimaksud adalah dapat bermuara kepada pemenuhan hak dasar masyarakat Indonesia yang lebih waspada guna melaksanakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan serta dalam rangka upaya mendukung pembangunan menuju Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Dari kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dari tugas pokok dan fungsi BPBD

1. Persentase masyarakat siaga bencana,
2. Persentase tim penanggulangan bencana yang terdidik,
3. Persentase tersedianya sarpras penanggulangan bencana.

b. Penanganan Strategi Penanggulangan Bencana Kabupaten Pacitan

Sebelum disusunnya konsep skenario penanggulangan bencana, perlu adanya suatu pengembangan penanganan strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi yang ada, serta pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan.

Prioritas yang dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penanggulangan bencana adalah :

1. Strategi perencanaan penanggulangan bencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
2. Strategi peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. Strategi penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;
4. Strategi pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan Penanggulangan bencana mempertimbangkan :

- 1) Prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- 3) Anggaran yang disediakan dalam rangka penanggulangan bencana;
- 4) Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; secara lintas sektoral
- 5) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan

3.5 PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

3.5.1. Gambaran Pelayanan SKPD

- **Pelayanan Penanganan Pra Bencana**

Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.

- e. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
- f. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
- g. Pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

- **Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat**

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

- a. Pencarian (search and rescue)
- e. Pertolongan melaksanakan pertolongan medis (P3K)
- f. Evakuasi
- g. Logistik / Dapur Umum

- **Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

- a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi
- e. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan
- f. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi
- g. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

- **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kabupaten Pacitan.

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga terlihat dari realisasi pendanaannya.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

- Kondisi Geografis Kabupaten Pacitan;
- Penanganan Penanggulangan bencana rata-rata hanya secara sporadis karena belum semua BPBD mempunyai dasar hukum rencana penanggulangan bencana beserta turunannya (Protap, SOP, dll)
- Keterbatasan anggaran;
- Keterbatasan kualitas personil lembaga;
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana;
- Belum adanya keseragaman antara penyelenggaraan penanggulangan bencana mengenai tipe BPBD secara nasional.

3.5.3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah:

1. Meningkatnya kinerja aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase SOP yang diterapkan.
- b) Persentase SPM yang diterapkan..
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanggulangan bencana

2. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase Terbentuknya masyarakat sadar bencana.
- b) Persentase pelatihan penanggulangan bencana

3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik
- b) Persentase jumlah Sarana prasarana penanggulangan bencana

4. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase jumlah korban yang mendapat bantuan
- b) Persentase jumlah sarana prasarana umum yang direhabilitasi dan direkonstruksi

3.5.4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario penanggulangan Bencana Kabupaten Pacitan diimplikasikan adalah dengan asumsi sebagai berikut

- 1) Pembagian struktur penanganan bencana sampai dengan tingkat dusun.
- 2) Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada.
- 3) Penanganan sistem informasi kebencanaan yang terpusat di BPBD Kabupaten.

Dalam hal ini kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:

- 1) Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil
- 2) Adanya Standar operasional prosedur penanggulangan bencana
- 3) Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana .
- 4) Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana
- 5) Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai

3.5.5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

Untuk memenuhi skenario apabila diimplikasikan sesuai dengan KLHS maka dilakukan penetapan strategi bagi tiap-tiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan skenario penanggulangan bencana di Kabupten Pacitan . Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi yang ada.

Isu-isu Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi perencanaan penanggulangan bencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;

- 2) Strategi peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
- 3) Strategi penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif, terkoordinir dan /terpadu;
- 4) Strategi pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.



Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 VISI DAN MISI

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2011-2016, maka visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah:

“TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA SECARA CEPAT, TEPAT, TERENCANA, TERKOORDINASI DAN TERPADU”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, Administrasi , sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur.

2. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam kesiapsiagaan serta pengurangan resiko bencana.
3. Melaksanakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan dalam pemulihan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan **tujuan** di dalam Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah :

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur;
2. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana;
3. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal ;
4. Mewujudkan kapasitas perencanaan dalam pemulihan yang meliputi tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadi bencana.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan

pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah:

1. Meningkatnya kinerja aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase SOP yang diterapkan.
- b) Persentase SPM yang diterapkan.
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanggulangan bencana

2. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase Terbentuknya masyarakat sadar bencana.
- b) Persentase pelatihan penanggulangan bencana

3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik
- b) Persentase jumlah Sarana prasarana penanggulangan bencana

4. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase jumlah korban yang mendapat bantuan
- b) Persentase jumlah sarana prasarana umum yang direhabilitasi dan direkonstruksi

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pacitan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S - O (*Strengths - Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

TABEL IV.1

**KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2016
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

VISI : “TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA SECARA CEPAT, TEPAT, TERENCANA, TERKOORDINASI DAN TERPADU”							
MISI I : Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program administrasi , sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan profesionalisme aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase SOP yang diterapkan - Persentase SPM yang diterapkan - Indeks Kepuasan Masyarakat 					

MISI II : Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam kesiapsiagaan serta pengurangan resiko bencana							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana.	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	- Kel/Desa Siaga Bencana (%)	2,92%	4,09%	5,85%	8,77%	9,94%
MISI III : Melaksanakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana	- Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik (%) - Persentase jumlah Sarana prasarana penanggulangan bencana	6,80%	13,61%	20,41%	29,48%	38,55%
			38,97%	44,12%	47,84%	62,47%	76,49%

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

4.4.1 Strategi

Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan Strategi SKPD yang berisi rencana penyusunan dan terpadu mengenai upaya – upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan program organisasi yang meliputi aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan lingkungan yang dihadapi. Adapun disain strategi sebagaimana dirumuskan dalam matrik analisis SWOT berikut : (Tabel IV.1)



Tabel IV. 1 Matrik Analisis SWOT

<p>STRATEGI ANALISIS FAKTOR INTERNAL</p> <p>STRATEGI ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>STRENGTH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan undang-undang 2. Pengalaman melaksanakan program penanggulangan bencana 3. Dukungan pimpinan 	<p>WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Keterbatasan dana 8. Keterbatasan kualitas personil lembaga 9. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
<p>OPPORTUNITY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geografi kabupaten yg rawan bencana 2. Kebutuhan SDM aparatur profesional 3. Kebijakan OTODA 	<p>ASUMSI S – O MOBILISASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun standar pelayanan 2. Pengembangan Program Penanggulangan Bencana 	<p>ASUMSI W – O PENGEMBANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 2. Meningkatkan jejaring kerja
<p>THREAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melaksanakan tupoksi 2. Mekanisme kerja dan koordinasi antar susunan Pemerintah dan antar lembaga Penanggulangan bencana yang belum tertata dengan baik. 	<p>ASUMSI S – T MENCARI PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manajemen penanggulangan bencana 2. Membangun komunikasi dan informasi antar lembaga /organisasi yg ada hubungannya dengan penanggulangan bencana (PMI, DINSOS, DINKES,ORARI, RAPI dll) 	<p>ASUMSI W – T PENYELAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program kebencanaan

4.4.2 Kebijakan

Strategi tersebut dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan Pra Bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana.
2. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana.
3. Pendekatan sistem koordinasi kepada semua SKPD yang ada.



Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi:

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

a. Program Kegiatan :

1. % Ketersediaan Sarpras Penanggulangan Bencana

Kegiatan:

1) Peningkatan Akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini

Indikator Keluaran (*Output*) : Kecepatan informasi kemungkinan akan terjadi bencana.

Kelompok sasaran : Daerah rawan bencana

2) Pembuatan Jalur Evakuasi

Indikator Keluaran (*Output*) : Kelancaran arah dalam melakukan melakukan evakuasi korban bencana.

Kelompok sasaran : Wilayah rawan bencana

3) Penanganan Bencana Kekeringan

Indikator Keluaran (*Output*) : Tercukupinya kebutuhan air bersih

Kelompok sasaran : Wilayah rawan bencana kekeringan

2. % Tim Penanggulangan Bencana Terdidik

Kegiatan :

1) Peningkatan Pelatihan Ketanggapdaruratan

Indikator Keluaran (*Output*) : Tim terdidik penanggulangan bencana.

Kelompok sasaran : Masyarakat dan tim penanggulangan bencana

2) Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)

Indikator Keluaran (*Output*) : Tim ahli penanggulangan bencana

Kelompok sasaran : Wilayah bencana

3) Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Pasca Bencana

Indikator Keluaran (*Output*) : Tertanganinya data korban yang terkena bencana alam.

Kelompok sasaran : Wilayah bencana

4) Pemulihan Dampak Bencana

Indikator Keluaran (*Output*) : Terbinanya korban dampak bencana.

Kelompok sasaran : Wilayah bencana

5) Pembentukan Relawan

Indikator Keluaran (*Output*) : Terbentuknya tim relawan yang handal.

Kelompok sasaran : Wilayah bencana

6) Gladi Lapang Penanggulangan Bencana

Indikator Keluaran (*Output*) : Terbinanya masyarakat dan aparat dalam menghadapi bencana.

Kelompok sasaran : Masyarakat wilayah bencana dan aparat

3. % Kelurahan/Desa Siaga Bencana

Kegiatan :

1) Sosialisasi Penanggulangan Bencana

Indikator Keluaran (*Output*) : Jumlah desa yang mendapat pengetahuan tentang penanggulangan bencana.

Kelompok sasaran : Masyarakat, Kel/Desa rawan bencana

2) Pendataan dan Pemetaan wilayah resiko bencana

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya jumlah peta data wilayah resiko bencana

Kelompok sasaran: masyarakat / wilayah rawan bencana

3) Operasional Posko Penanggulangan Bencana

Indikator Keluaran (*Output*) : Tim siaga pengendalian dan informasi penanggulangan bencana

Kelompok sasaran : Wilayah rawan bencana

4) Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Indikator Keluaran (*Output*) : Terbentuknya desa tangguh bencana

Kelompok sasaran : Wilayah rawan bencana

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. target masing-masing kegiatan disajikan dalam Tabel V.1 :



TABEL V.1

**TABEL PENETAPAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

(tabel ini dipindahkan isinya ke Tabel V.2 yang dibawah, gunakan format table V.2)

No.	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Pekerjaan Umum							
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	Persentase tertib administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam							
	Persentase Tersedianya Sarpras Penanggulangan bencana	-	3%	38,97%	44,12%	47,84%	62,47%	76,49%
	Persentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik	-	-	6,80%	13,61%	20,41%	29,48%	38,55%
	Persentase Kelurahan/Desa Siaga Bencana	-		2,92%	4,09%	5,85%	8,77%	9,94%

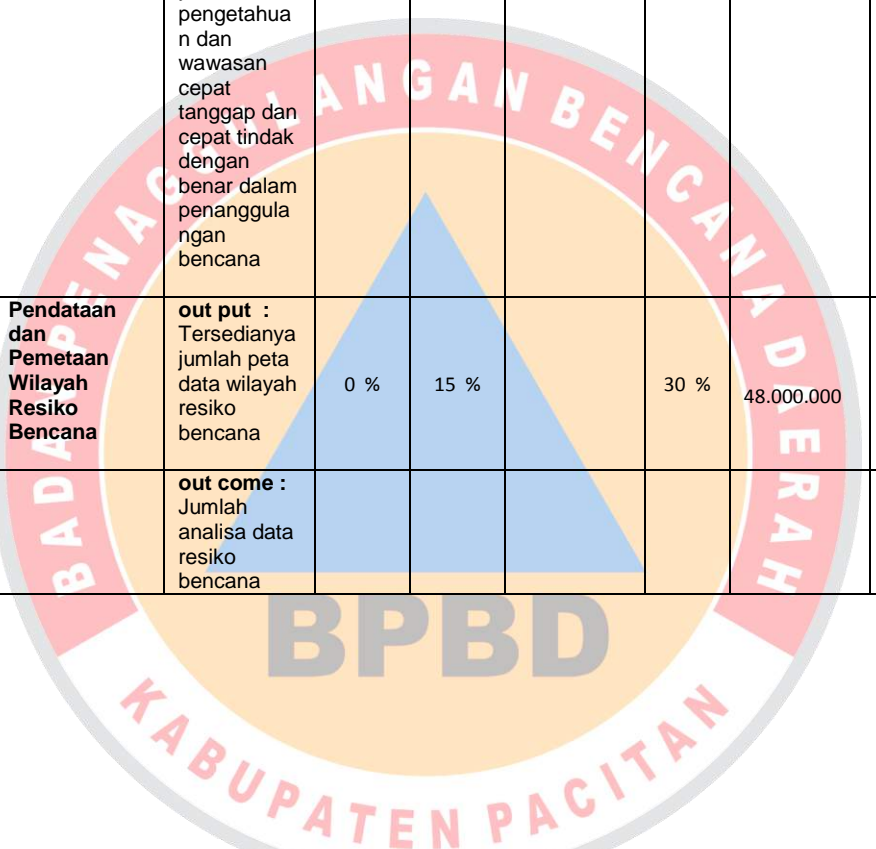
TABEL V.2
Program dan Kegiatan Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2011 - 2016
Kabupaten Pacitan

Tujuan 1: Mewujudkan profesionalisme aparatur.

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJM			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD	Administrasi perkantoran																		
		Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	out put :	0 %	15 %	229.500.000	30 %	263.925.000	45 %	303.513.750	60 %	349.040.813	80 %	401.396.934	100 %	461.606.475	100 %	461.606.475	BPBD Kab. Pacitan	
			Juml; & jns adm perkantoran yg dikelola																	
			out come :																	
			% tertib adm perkantoran																	
		BELANJA LANGSUNG	0 %	15 %	229.500.000	30 %	263.925.000	45 %	303.513.750	60 %	349.040.813	80 %	401.396.934	100 %	461.606.475	100 %	461.606.475	BPBD Kab. Pacitan		
		BELANJA PEGAWAI	0 %	15 %	42.132.000	30 %	48.451.800	45 %	55.719.570	60 %	64.077.506	80 %	73.689.131	100 %	84.742.501	100 %	84.742.501	BPBD Kab. Pacitan		
		Bij. BARANG DAN JASA	0 %	15 %	147.368.000	30 %	169.473.200	45 %	194.894.180	60 %	224.128.307	80 %	257.747.553	100 %	296.409.686	100 %	296.409.686	BPBD Kab. Pacitan		
		BELANJA MODAL	0 %	15 %	40.000.000	30 %	46.000.000	45 %	52.900.000	60 %	60.835.000	80 %	69.960.250	100 %	80.454.288	100 %	80.454.288	BPBD Kab. Pacitan		

Tujuan II
Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Komitmen serta Perilaku dan Budaya Sadar bencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kelurahan/ Desa Siaga Bencana (%)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Sosialisasi Penanggulangan Bencana	out put : Jumlah desa yang mendapat pengetahuan tentang penanggulangan bencana	0 %	15 %		30 %	50.000.000	45 %	40.000.000	60 %	30.000.000	80 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	180.000.000	BPBD Kab. Pacitan
		Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana	out put : Tersedianya jumlah peta data wilayah resiko bencana	0 %	15 %		30 %	48.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		128.000.000	BPBD Kab. Pacitan
		out come : Jumlah analisa data resiko bencana																	



		Operasional Posko Penanggulangan Bencana	out put : Terbentuknya tim siaga pengendalian dan informasi penanggulangan bencana out come : Pusat pengendalian data dan informasi	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %			50.000.000		100.000.000		100.000.000		250.000.000	BPBD Kab. Pacitan
		Pembentukan Desa Tangguh Bencana	out put : Terbentuknya desa tangguh bencana out come : Jumlah desa yang mampu dan tanggap dalam penanganan bencana	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %			-		75.000.000		75.000.000		150.000.000	BPBD Kab. Pacitan



BAB VI

Indikator Kinerja APBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Misi I : Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Tujuan : Mewujudkan profesionalisme aparatur

Sasaran : Meningkatnya kinerja aparatur

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Indikator 1 : Jumlah Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan setelah berdirinya BPBD pada Tahun 2011 maka pelaksanaan pekerjaan perlu adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) disesuaikan dengan jenis pekerjaan dalam penanggulangan bencana yang akan dilakukan.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah SOP yang ada	0	1	2	3	4	5	5

Indikator 2 : Persentase pelaksanaan SOP.

Kondisi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur tahun 2011 sebesar 10 % dan capaian di tahun 2016 ditargetkan sebesar 100 % dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 20 %. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

1	Persentase SOP yang dilaksanakan	0	15	40	60	80	100	100
---	----------------------------------	---	----	----	----	----	-----	-----

2. **Misi III** : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

Tujuan : Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana;

Sasaran :

a. Meningkatkan Pengetahuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

- 1) Indikator 1: Jumlah Kelompok Masyarakat Sadar Bencana yang terbentuk dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang tangguh perlu adanya peran masyarakat untuk perlu adanya kelompok-kelompok masyarakat yang berkiprah dalam penanggulangan bencana.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pokmas Siaga Bencana	0	1	4	7	10	12	12

- 2) Indikator 2 : Persentase Terbentuknya masyarakat sadar bencana

Kondisi pelaksanaan Terbentuknya masyarakat sadar bencana tahun 2011 sebesar 12 % dan capaian di tahun 2016 ditargetkan sebesar 100 % dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 20 %. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Pokmas Siaga Bencana	0	12	33	58	83	100	100

- 3) Indikator 1 : Jumlah Pelatihan Penanggulangan yang dilaksanakan

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang tangguh perlu adanya pelatihan / gladi antara masyarakat guna tercapainya sinergi yang baik dalam penanganan di lapangan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pelatihan PB yang dilaksanakan	0	1	2	3	3	3	12

4) Indikator 2: Persentase pelatihan penanggulangan bencana

Kondisi pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana tahun 2011 sebesar 25 % dan capaian di tahun 2016 ditargetkan sebesar 100 % dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 20 %. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Pokmas Siaga Bencana	0	12	25	50	75	100	100

b. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

1) Indikator 1: Jumlah Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang tangguh perlu adanya Tim Penanggulangan Bencana dari instansi-instansi terkait dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan .

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tim PB yang terdidik	0	1	4	7	10	13	13

2) Indikator 2 : Persentase Tim PB yang terdidik

Kondisi pelaksanaan Terbentuknya Tim PB yang terdidik tahun 2011 sebesar 12 % dan capaian di tahun 2016 ditargetkan sebesar 100 % dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 20 %. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Tim PB yang terdidik	0	12	33	58	83	100	100

Selain indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, terdapat juga indikator-indikator kinerja lain dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
2. Tertib administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
3. Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian
4. Persentase jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana
5. Persentase jumlah korban yang mendapat bantuan
6. Persentase jumlah sarana prasarana umum yang direhab/rekonstruksi

Penutup

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016, sebagai bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan.

Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governament* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) BPBD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis BPBD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 2011-2016 : **"Terciptanya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera"**.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. DIDIT MARYANTO, MM.

Pembina

NIP. 19650506 199403 1 011